



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Renja ini disusun untuk memenuhi kewajiban Instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Renja ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Renja ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja dimasa mendatang.

Ucapan terima kasih kepada tim yang telah memberikan konstribusi dalam penyusunan Renja Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun Anggaran 2018 ini.

Malili, 13 Juli 2018
KEPALA DINAS,

Ir.H.Firnandus Ali,M.Si
Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP. 19600515 198503 1 020



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv

BAB. I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB. III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.2. Program dan Kegiatan

BAB. IV : PENUTUP.



DAFTAR FORM

- Form I.** Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018 Kabupaten Luwu Timur
- Form II.** Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Luwu Timur
- Form IV.** Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2018 Dinas Transmigrasi, Tenaga kerja dan Perindustrian
- Form V.** Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2018 Dinas Transmigrasi, Tenaga kerja dan Perindustrian
- Form VI.** Evaluasi Hasil Renja Tahun 2017 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2018 Kabupaten Luwu Timur
- Form VII.** Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2018 Kabupaten Luwu Timur
- Form VIII.** Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2018 Kabupaten Luwu Timur



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Amanat UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Maka setiap SKPD wajib menyusun Renja. Renja SKPD disusun dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Tuntutan atas pelaksanaan pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, merupakan salah satu pertimbangan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah antara lain disebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah dari lingkup eselon II diharapkan telah mempunyai perencanaan strategis tentang program-program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun mendatang yang dapat diimplementasikan.

Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategi sangat dinamis dengan faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan sering tidak terduga, maka dikembangkan model perencanaan strategi yang intinya mengacu pada Visi-Misi dan berbasis pada analisis lingkungan strategi.

Rencana Kerja Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Perumusan rancangan Renja ini merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja dan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2010:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);



2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur untuk merumuskan kebijakan dan program strategi guna meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan serta berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Renja sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian sasaran/tujuan strategi, visi dan misi organisasi.



1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan;

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018;

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan wal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab. III Tujuan, Sasaran, ProgramDan Kegiatan

- 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab. IV Penutup
Lampiran



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD

Penyusunan Renja Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian berpedoman pada Renstra SKPD yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur juga mengacu pada Renstra Departemen Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang diimplementasikan melalui dukungan dana yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Strategi yang telah ditetapkan.

Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur menetapkan Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun Anggaran 2016 – 2021, dijabarkan pula indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD seperti terlihat pada **Tabel Indikator Kinerja Daerah (Terlampir)**.

Secara umum evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2018 dilakukan dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja SKPD. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang ditetapkan.

Berkaitan dengan pelaksanaan Tahun Anggaran 2018 Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, telah wajib melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD berdasarkan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018. Evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2018 dapat



dilihat melalui **Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan** yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun Anggaran 2016-2021 disajikan pada **Form I dan Form VI (Terlampir)**.

Evaluasi Capaian Tahun 2018 merupakan ukuran kinerja aparatur dalam upaya pencapaian indikator kinerja Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam RENSTRA SKPD yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran 1. Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS

1. Jumlah pegawai yang mendapat gaji dan tunjangan lainnya serta tambahan penghasilan PNS pada Tahun 2018 yaitu 30 orang, sedangkan pada Tahun 2016 dan 2017 juga sebanyak 29 orang;

Penjelasan :

Pada Tahun 2016, 2017 Tetap dan 2018 jumlah pegawai PNS mengalami kenaikan;

Sasaran 2. Terwujudnya Administrasi Perkantoran

1. Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumberdaya air dan listrik pada Tahun 2017 yaitu 5 Rekening, pada Tahun 2016 3 Rekening dan Tahun 2013 3 Rekening;

Penjelasan :

Adanya kebutuhan sarana komunikasi, sumberdaya air dan listrik pada Tahun 2016 ke Tahun 2017 tetap sama dan Tahun 2018, mengalami perubahan kenaikan;

2. Jumlah Pegawai yang Menerima Honor Pada Tahun 2016 Kegiatan Ini belum ada di dalam DPA Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Perindustrian sementara di tahun 2017 sebanyak 5 orang dan tahun 2018 sebanyak 5 orang;

Penjelasan :

Adanya Jumlah pegawai yang menerima honor. Pada tahun 2016 kegiatan ini belum ada. Namun di tahun 2017 kegiatan sudah di anggarkan dalam DPA Distransnakerin sebanyak 5 Orang dan Di tahun 2018 sebanyak 5 orang;



- 3 Jumlah Tenaga Kebersihan yang disiapkan Tahun 2018 yaitu 1 Orang, pada Tahun 2016 1 Orang dan Tahun 2017 1 Orang;

Penjelasan :

Tenaga kebersihan yang disiapkan pada Tahun 2016 ke Tahun 2017 tidak ada perubahan sampai dengan tahun 2018 sama;

- 4 Jumlah peralatan kerja yang dipelihara pada tahun 2016 23 Unit dan 2017 23 Unit dan tahun 2018 23 orang;

Penjelasan :

Adanya peralatan kerja yang dipelihara pada tahun 2016 dan 2017 sama besaran peralatan yang dipelihara begitupun ditahun 2018;

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor pada Tahun 2018 yaitu 5 Jenis, Tahun 2016 7 Jenis dan tahun 2017 7 jenis;

Penjelasan :

Adanya komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor pada Tahun 2016 ke Tahun 2017 tidak ada perubahan dan Tahun 2018 mengalami perubahan;

- 5 Jumlah kebutuhan surat kabar/majalah pada Tahun 2018 Yaitu 5 Eksampler, Tahun 2016 6 Eksampler dan Tahun 2017 6 Eksampler;

Penjelasan :

Kebutuhan surat kabar/majalah pada Tahun 2016 ke Tahun 2017 Tidak mengalami perubahan dan pada Tahun 2017 mengalami perubahan kenaikan;

- 6 Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2018 yaitu 46 Kali, Tahun 2016 22 kali dan Tahun 2017 64 kali;

Penjelasan :

Adanya perjalanan dinas luar daerah dan luar Propinsi pada Tahun 2016 ke Tahun 2017 terjadi peningkatan dan pada Tahun 2018 mengalami perubahan;

- 7 Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis pada Tahun 2018 yaitu 18 Orang, sedangkan Tahun 2016 sebanyak 13 orang dan Tahun 2017 sebanyak 13 Orang;

Penjelasan :



Pada Tahun 2016 ke Tahun 2017 tidak ada perubahan kenaikan dan Tahun 2017 mengalami perubahan kenaikan;

- 8 Jumlah penunjang administrasi kesekretariatan SKPD pada Tahun 2017 yaitu 95 Persen, Tahun 2016 50 Jenis dan Tahun 2017 52 Jenis;

Penjelasan :

Adanya penunjang administrasi kesekretariatan SKPD pada Tahun 2016 ke Tahun 2017 tetap dan tahun 2018 terjadi perubahan menjadi persentase dengan adanya hasil cascading dari kementerian RB;

10. Jumlah Monitoring dan Evaluasi pada tahun 2018 yaitu 1 Dokumen, Tahun 2016 44 kali kegiatan tahun 2017 sebanyak 231 kali,

Penjelasan :

Pada tahun 2016 44 kali dan tahun 2017 sebanyak 231 kali mengalami kenaikan dan tahun 2017 mengalami perubahan regulasi menjadi dokumen;

11. Jumlah Kunjungan Kerja dalam daerah pada tahun 2016 kegiatan ini belum dianggarkan masih bergabung pada kegiatan kesekretariatan SKPD dan tahun 2017 sebanyak 200 kali serta tahun 2018 sebanyak 120 kali;

Penjelasan:

Pada tahun 2016 kegiatan ini berada pada kesekretariatan SKPD dan tahun 2017 sebanyak 200 Kali dan tahun 2018 120 kali;

Sasaran 3. Prosentase Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Jumlah Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor pada tahun 2018 tidak ada dan tahun 2016 sementara tahun 2017 12.000 VA ;

Penjelasan :

Pada Tahun 2016 dan Tahun 2018 tidak ada pengadaan dan tahun 2017 Dengan Berpindahnya Kantor mengalami perubahan daya Listrik Kantor sebesar 12.000 VA dan sebelumnya hanya 5.500 VA

- 2 Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Tahun 2017 yaitu 11 Jenis, sedangkan pada Tahun 2016 0 Jenis dan Tahun 2017 sebanyak 8 Jenis



Penjelasan :

Pada Tahun 2016 s/d 2017 mengalami kenaikan pada Tahun 2018 mengalami peningkatan.

- 3 Jumlah pengadaan bangunan gudang pada Tahun 2018 yaitu 0 Paket, pada tahun 2016 1 Paket dan tahun 2017 0 paket

Penjelasan :

Pada Tahun 2016 ke Tahun 2017 mengalami penurunan sampai pada tahun 2018;

- 4 Jumlah pemeliharaan gedung/kantor dinas pada Tahun 2018 yaitu 1 Paket, Tahun 2016 1 Paket dan Tahun 2017 1 Paket

Penjelasan :

Pemeliharaan gedung/kantor dinas pada Tahun 2016 ke Tahun 2017 sampai tahun 2018 tidak mengalami perubahan tetap 1 paket;

- 5 Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional pada Tahun 2018 yaitu 20 Unit, Tahun 2016 10 Unit dan 2017 20 Unit

Penjelasan :

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional pada Tahun 2016 ke Tahun 2017 mengalami perubahan dan pada Tahun 2018 mengalami perubahan kenaikan.

Sasaran 4. Prosentase Jumlah PNS yang Terlayani Untuk Ikut Pendidikan dan Pelatihan

1. Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek pada Tahun 2018 yaitu 20 Orang, sedangkan pada Tahun 2016. 9 Orang dan Tahun 2017 sebanyak 20 Orang

Penjelasan :

Pada Tahun 2016 ke tahun 2017, mengalami kenaikan namun pada Tahun 2018 tidak mengalami perubahan;

Sasaran 5. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

1. Jumlah dokumen hasil monitoring kegiatan pada Tahun 2018 yaitu 1 dokumen, Tahun 2016 sebesar 2 Dokumen; dan pada tahun 2017. 1 Dokumen

Penjelasan :



Adanya dokumen hasil monitoring kegiatan pada Tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan, dan Tahun 2018 tidak mengalami perubahan.

Sasaran 6. Tercapainya laporan keuangan yang akuntabel dan Transparan

1. Jumlah Pelaporan akuntabilitas kinerja pada tahun 2018.3 dokumen dan tahun 2016 kegiatan ini belum dianggarkan dan tahun 2017 3 dokumen

Penjelasan :

Adanya Pelaporan akuntabilitas kinerja pada tahun 2016 belum dianggarkan dan di tahun 2017 dan 2018 kegiatan ini baru terlaksana.

2. Jumlah Laporan Keuangan dan barang dana dekonsentrasi. Pada tahun 2018 12 kali dan tahun 2016 tidak dianggarkan dan tahun 2017 12 kali

Penjelasan :

Pada Tahun 2016 kegiatan ini belum dianggarkan nanti di tahun 2017 dan 2018 baru dianggarkan

Sasaran 7. Tersedianya Data Base Ketenagakerjaan Daerah

1. Jumlah Dokumen Database ketenagakerjaan daerah pada tahun 2018 1 Dokumen dan Tahun 2016 kegiatan ini tidak dianggarkan dan tahun 2017 1 dokumen

Penjelasan :

Adanya Dokumen database ketenagakerjaan Daerah di tahun 2017 dianggarkan karena kegiatan ini sifatnya hanya satu kali penganggaran

Sasaran 8. Terlaksananya Bimbingan penyuluhan dan terhadap pencari kerja

1. Jumlah Bimbingan dan pelatihan terhadap pencari kerja yang dilaksanakan pada tahun 2017 sebanyak 11 Kali dan Tahun 2016 kegiatan ini belum dianggarkan dan tahun 2018 sebanyak 330 orang.

Penjelasan :

Kegiatan ini terlaksana pada tahun 2018 dan 2017 namun pada tahun 2016 kegiatan ini belum di alokasikan anggarannya

Sasaran 9. Ketercapaian persentase data dan informasi perusahaan bagi pencari

1. Jumlah lowongan kerja yang disebarluaskan pada Tahun 2018 yaitu 700 pencari Lowongan kerja dan Tahun 2016 sama sebanyak 11 Kecamatan dan tahun 2017 sebanyak 11 kecamatan



Penjelasan :

Pada Tahun 2016 dan 2017 penyebarluasan lowongan kerja tetap.sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 700 lowongan kerja,

Sasaran 10.Terlaksananya Kegiatan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

1. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan pada Tahun 2018 yaitu 66 Orang, dan tahun 2016 sebanyak 22 Orang dan tahun 2017 66 Orang,

Penjelasan :

Adanya kegiatan kerjasama pendidikan dan pelatihan di Tahun 2016 sebanyak 22 orang dan di Tahun 2017 dan 2018 Bertambah Karena meningkatnya Jumlah Peserta yang terdidik sebanyak 66 Orang.

Sasaran 11. Tersedianya tenaga kerja Trampil

Jumlah tenaga kerja yag dilatih pada tahun 2016 dan tahun 2017 kegiatan ini belum dianggarkan karena belum ada dalam renstra dan di tahun 2018 sebanyak 50 Orang,

Penjelasan :

Adanya kegiatan Penyiapan tenaga kerja siap pakai di tahun 2016 dan 2017 kegiatan ini belum dianggarkan dalam renstra namun di tahun 2018 sebanyak 50 orang,

Sasaran 12. Terlaksananya monitoring pelaksanaan kegiatan

Tesedianya sarana dan prasarana infrastruktur sederhana sebagai penunjang kegiatan pada tahun 2016 sebanyak 3 lokasi dan di tahun 2017 kegiatan ini tdk dianggarkan namun di tahun 2018 sebanyak 3 Lokasi,

Penjelasan :

Adanya kegiatan pendampingan dana tugas pembantuan bidang pemberdayaan tenaga kerja di tahun 2016 sebanyak 3 lokasi dan di tahun 2017 tdk ada kegiatan namun di tahun 2018 sebanyak 3 lokasi



Sasaran 13. Terlaksananya penanganan tenaga kerja indonesia yang bermasalah

Jumlah tenaga kerja yang terlindungi pada tahun 2018 di target dalam DPA Disntransakerin terdapat 4 orang yang disiapkan. Namun pada tahun 2016 dan 2017 kegiatan ini belum di anggarakan,

Penjelasan :

Adanya kegiatan Penanganan dan perlindungan tenaga kerja indonesia diluar negeripada tahun 2016 dan tahun 2017 kegiatan ini belum dianggarkan namun di tahun 2018 sebanyak 4 orang

Sasaran 14. Tercapainya penyelesaian perselisihan hubungan industri

1. Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industri pada Tahun 2018 yaitu 8 Kasus, dan Tahun 2016 3 Kasus dan tahun 2017 12 kasus

Penjelasan :

Kasus yang terselesaikan Tahun 2016 dan Tahun 2017 terjadi kenaikan. dan kasus di tahun 2018 mengalami penurunan,

Sasaran 15. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya

1. Jumlah dokumen upah minimum kabupaten yang ditetapkan pada Tahun 2017 1 Dokumen dan di tahun 2016 sebanyak 0 Dokumen untuk tahun 2018 sebanyak 1 dokumen

Penjelasan :

Pada Tahun 2016 sebanyak 0 Dokumen dan di tahun 2017 1 dokumen dan tahun 2018 sebanyak 1 dokumen tidak ada kenaikan.

Sasaran 16. Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang hubungan industrial

Jumlah pekerja dan pengusaha yang mengikuti sosialisasi pada tahun 2016 dan 2017 kegiatan ini belum di anggarakan namun pada tahun 2018 sebanyak 100 Orang

Penjelasan:

Pada tahun 2016 dan tahun 2017 kegiatan ini belum di masukkan dalam renstra namun dalam tahun 2018 sebanyak 100 Orang.



Sasaran 17. Terwujudnya rumusan kebijakan ketenagakerjaan dikabupaten

Terlaksananya rapat LKS Tripartit pada tahun 2016 dan tahun 2017 kegiatan ini belum di anggarkan dalam DPA disnaker namun pada tahun 2018 sebanyak 1 Lembaga

Penjelasan :

Pada tahun 2016 dan tahun 2017 kegiatan ini belum ada dalam renstra sehingga tidak di anggarkan dalam DPA Distransnakerin namun pada tahun 2018 sebanyak 1 Lembaga,

Sasaran 18. Terlaksananya pendataan dan pembinaan sarana hubungan industrial

Jumlah perusahaan yang dibina pada tahun 2016 dan tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sama besaran yang dibina,

Penjelasan :

Pada Tahun 2016 dan tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sama besaran perusahaan yang dibina,

Sasaran 19. Terwujudnya Pemahaman tentang berbagai peraturan Ketenagakerjaan

Jumlah media publikasi yang digunakan untuk sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan pada Tahun 2017 yaitu 3 Jenis, dan tahun 2016 3 jenis dan tahun 2018 4 jenis

Penjelasan :

Pada Tahun 2016,2017 sama besaran dan Tahun 2018 jumlah media informasi sebanyak 4 Jenis.

Sasaran 20. Terlaksananya pembinaan serikat pekerja/buruh

1. Jumlahserikat pekerja/buruh pada Tahun 2016 dan tahun 2017 kegiatan ini belum dianggarkan namun pada tahun 2018 sebanyak 32 OPP,

Penjelasan :

Adanya pembinaan serikat pekerja/buruh pada tahun 2016 dan tahun 2017 kegiatan ini belum di alokasikan anggaranya dan Tahun 2018kegiatan ini baru di alokasikan anggaran.sebanyak 32 OPP.



Sasaran 15. Prosentase IKM yang mengikuti Bimbingan Tekhnis

1. Jumlah IKM yang Mengikuti Bimtek pada Tahun 2017 yaitu 11 IKM dan Tahun 2015 dan Tahun 2016 kegiatan ini tidak di anggarkan. karena masih bergabung pada Dinas Koperindag

Penjelasan :

IKM yang mengikuti Bimtek pada tahun 2017 sebanyak 11 IKM

Sasaran 16. Prosentase IKM yang menjalin Kemitraan

1. Jumlah IKM yang Menjaln Kemitraan pada Tahun 2017 yaitu 8 IKM dan Tahun 2015 dan Tahun 2016 kegiatan ini tidak di anggarkan. karena masih bergabung pada Dinas Koperindag

Penjelasan :

IKM yang menjalin Kemitraan pada tahun 2017 sebanyak 8 IKM

Sasaran 17. Prosentase IKM yang mengikuti sosialisasi izin usaha indsutri

1. Jumlah IKM yang Mengikuti sosialisasi pada Tahun 2017 yaitu 50 IKM dan Tahun 2015 dan Tahun 2016 kegiatan ini tidak di anggarkan. karena masih bergabung pada Dinas Koperindag

Penjelasan :

IKM yang mengikuti sosialisasi pada tahun 2017 sebanyak 50 IKM

Sasaran 18. Jumlah Peraturan Daerah Terkait Perencanaan Pembangunan Indsutri Kabupaten

1. Jumlah Perda yang yang dibuat pada Tahun 2017 yaitu sebanyak 1 Perda dan Tahun 2015 dan Tahun 2016 kegiatan ini tidak di anggarkan. karena masih bergabung pada Dinas Koperindag

Penjelasan :

Jumlah Perda yang dibuat pada tahun 2017 sebanyak 1 Perda



Sasaran 19. Tersedianya data IKM yang berbasis KBLI dan Berstiker Industri

1. Jumlah IKM yang Berbasis KBLI dan Berstiker Industri pada Tahun 2017 yaitu 100 IKM dan Tahun 2015 dan Tahun 2016 kegiatan ini tidak di anggarkan. karena masih bergabung pada Dinas Koperindag

Penjelasan :

IKM yang Berbasis KBLI pada tahun 2017 sebanyak 100 IKM

Sasaran 20. Tersedianya sentra Industri

1. Jumlah Sentra yang terbentuk pada Tahun 2017 yaitu 1 Lokasi dan Tahun 2015 dan Tahun 2016 kegiatan ini tidak di anggarkan. karena masih bergabung pada Dinas Koperindag

Penjelasan :

Sentra Industri pada tahun 2017 sebanyak 1 Lokasi

Sasaran 21. Tersedianya Naskah Kerjasama Antar Daerah untuk Penempatan TPA

1. Jumlah MOU kerjasama antar daerah yang disepakati pada Tahun 2017 yaitu 3 Dokumen, 2015 sebanyak 3 Provinsi dan tahun 2016 1 dokumen

Penjelasan :

MOU kerjasama antar daerah Tahun 2015 ke Tahun 2016 3 Provinsi dan pada Tahun 2016 terjadi perubahan.

Sasaran 22. Tersedianya Informasi Bagi Transmigrasi Lokal

1. Jumlah transmigran yang mendapatkan penyuluhan pada Tahun 2016 yaitu 55 KK, dan 2015 sebanyak 50 KK sedangkan tahun 2016 50 KK

Penjelasan :

Transmigran yang mendapatkan penyuluhan Tahun 2015 ke Tahun 2016 dan tahun 2017 tetap.

Sasaran 23. Tersedianya Calon Transmigran Untuk Penempatan TPS

1. Jumlah transmigran yang akan ditempatkan pada Tahun 2017 yaitu 0 KK, dan 2015 sebanyak 50 KK sedangkan tahun 2016 sebanyak 0 KK



Penjelasan :

Transmigran yang akan ditempatkan Tahun 2015 ke Tahun 2016 terjadi perubahan kenaikan dan pada Tahun 2016 terjadi penurunan.

Sasaran 24. Jumlah Dokumen peta lahan Usaha Transmigrasi yang dibuat

1. Jumlah Peta yang Buat pada Tahun 2017 yaitu 5 Dokumen, dan 2015 dan tahun 2016 tidak ada

Penjelasan :

Dokumen Peta yang akan dibuat pada Tahun 2015 ke Tahun 2016 tidak ada kenaikan dan pada Tahun 2017 terjadi Kenaikan

Sasaran 25. Tersedianya Dokumen RENSTRA, RENJA, RKA

1. Jumlah Renstra, Renja dan RKA pada Tahun 2017 yaitu 5 Dokumen, dan 2015 dan tahun 2016 tidak ada

Penjelasan :

Dokumen yang akan dibuat pada Tahun 2015 ke Tahun 2016 tidak ada kenaikan dan pada Tahun 2017 terjadi Kenaikan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi laporan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur terlihat masih banyak permasalahan yang perlu diidentifikasi, yaitu:

2.2.1. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja

Pengangguran akan menimbulkan masalah ekonomi dan sosial bagi individu yang mengalaminya. Pengangguran juga akan berdampak negative terhadap keadaan ekonomi, politik sosial bagi daerah yang mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran sangat berpengaruh terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan pada suatu wilayah atau daerah.

Dalam kaitan itu, di Daerah Kabupaten Luwu Timur, sebagai daerah yang selama ini ekonominya didukung oleh industri pertambangan, bagi sejumlah masyarakat yang berada pada kawasan lingkaran tambang, pekerjaan menjadi karyawan Perusahaan tambang dan



kontraktor adalah pilihan utama yang paling di minati, selain profesi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang termasuk dambaan bagian besar dari warga masyarakat terdidik di daerah ini.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab pengangguran antara lain karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja, juga disebabkan karena perubahan struktur perekonomian, perubahan teknologi, serta keinginan memperoleh pekerjaan yang lebih baik, maka perlu :

- 1. Meningkatkan SDM melalui informasi kerja, pendidikan, keterampilan dan keahlian**

- 2.2.2 Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja**

Dalam proses produksi, tenaga kerja dan pengusaha adalah mitra yang saling mendukung dalam peningkatan produksi dan produktifitas. Dalam hubungan industrial sering terjadi perselisihan akibat penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang tidak sesuai, sehingga di perlukan keterlibatan pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu berupa mediasi, maka perlu :

- 1. Meningkatnya program perlindungan dan lembaga ketenagakerjaan**
- 2. Meningkatnya pemahaman mengenai undang – undang ketenagakerjaan**
- 3. Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan**

- 2.2.3 Bidang Ketransmigrasian**

Program transmigrasi merupakan program Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan dan pemerataan Pembangunan Daerah dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran serta pemerataan penyebaran penduduk dan ketenagakerjaan.

Disamping itu pembangunan pemukiman transmigrasi harus memberikan konstribusi bagi upaya peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan, pemantapan ketahanan Nasional, mengembangkan komoditas unggulan untuk menghasilkan bahan baku energy alternative serta mendukung pemerataan investasi.



Untuk mempercepat proses adaptasi dengan lingkungan sekitarnya serta mencegah timbulnya gejolak sosial akibat perubahan transmigran dengan masyarakat sekitar agar memahami dan mengerti tentang pentingnya hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam membangun daerah khususnya daerah Kabupaten Luwu Timur.

Untuk diterapkan kepada transmigran agar bisa memahami dan mengerti tentang tugas, hak dan kewajiban dan larangan yang harus di kerjakan didalam pembinaan dan penempatan unit pemukiman transmigrasi (UPT), maka perlu :

- 1. Meningkatnya program pengembangan wilayah tranmsigrasi**
- 2. Meningkatnya program transmigrasi lokal**

2.2.4 Perindustrian

Dalam Program Perindustrian mengalami beberapa kendala yang harus di selesaikan bersama baik melalui internal maupun eksternal.

Untuk peningkatan produksi yang belum optimal,

Untuk Tenaga ahli/Fungsional dan pembimbingan perindustrian yang ahli dalam menangani berbagai aspek manajemen dan lainnya dari industri yang ada

Untuk regulasi/Prodak hukum yang berkaitan dengan fasilitas dan kemudahan investasi di sektor industri hulu dan hilir maka perlu

- 1. Meningkatnya program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**
- 2. Meningkatnya program peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**
- 3. Meningkatnya Program Penataan Struktur Industri**
- 4. Meningkatnya Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial**

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD dilakukan guna melihat kondisi semua aspek yang terkait dengan eksistensi Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur beserta perkembangannya beberapa tahun ini terutama menyangkut pelayanan public (*public service*) dan tanggung jawab (*akuntabilitas*) dalam upaya mewujudkan pengelolaan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).



Identifikasi ini berguna untuk melihat sampai dimana posisi Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur saat ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang untuk mempertahankan keberhasilan dan mengeliminir kegagalan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, penyebab tidak terpenuhinya pencapaian target SKPD, antara lain karena:

- a. Tidak tersedianya rekanan yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kenaikan harga satuan barang.
- c. Adanya kejadian luar biasa (misalnya bencana banjir, gempa bumi dsb).

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang di rencanakan.

Berbagai faktor lingkungan baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan pembangunan dalam bidang Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian di Kabupaten Luwu Timur.

Bedasarkan hasil idenfikasi permasalahannya kaitannya dengan rencana pembangunan Nasional (Renstra K/L) dan Provinsi (Renstra Provinsi), tata ruang dan lingkungan serta pelaksanaan MDGs, maka isu-isu strategis yang menjadi fokus pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dn perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja

Pengangguran akan menimbulkan masalah ekonomi dan sosial bagi individu yang mengalaminya. Pengangguran juga akan berdampak negative terhadap keadaan ekonomi, politik sosial bagi daerah yang mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi



Pengangguran sangat berpengaruh terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan pada suatu wilayah atau daerah.

Dalam kaitan itu, di Daerah Kabupaten Luwu Timur, sebagai daerah yang selama ini ekonominya didukung oleh industri pertambangan, bagi sejumlah masyarakat yang berada pada kawasan lingkaran tambang, pekerjaan menjadi karyawan Perusahaan tambang dan kontraktornya adalah pilihan utama yang paling diminati, selain profesi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang termasuk dambaan bagian besar dari warga masyarakat terdidik di daerah ini.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab pengangguran antara lain karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja, juga disebabkan karena perubahan struktur perekonomian, perubahan teknologi, serta keinginan memperoleh pekerjaan yang lebih baik.

2. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Dalam proses produksi, tenaga kerja dan pengusaha adalah mitra yang saling mendukung dalam peningkatan produksi dan produktivitas. Dalam hubungan industrial sering terjadi perselisihan akibat penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang tidak sesuai, sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu berupa mediasi.

3. Bidang Ketransmigrasian

Program transmigrasi merupakan program Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan dan pemerataan Pembangunan Daerah dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran serta pemerataan penyebaran penduduk dan ketenagakerjaan.

Disamping itu pembangunan pemukiman transmigrasi harus memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan, pemantapan ketahanan Nasional, mengembangkan komoditas unggulan untuk menghasilkan bahan baku energi alternatif serta mendukung pemerataan investasi.



Untuk mempercepat proses adaptasi dengan lingkungan sekitarnya serta mencegah timbulnya gejolak sosial akibat perubahan transmigran dengan masyarakat sekitar agar memahami dan mengerti tentang pentingnya hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam membangun daerah khususnya daerah Kabupaten Luwu Timur.

Untuk diterapkan kepada transmigran agar bisa memahami dan mengerti tentang tugas, hak dan kewajiban dan larangan yang harus di kerjakan didalam pembinaan dan penempatan unit pemukiman transmigrasi (UPT).

4. Bidang Perindustrian

Pengembangan industri di Kabupaten Luwu Timur tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan. Dalam Struktur perekonomian kabupaten kontribusinya terhadap pembentukan PDRB adhk (DT) Kabupaten menempati urutan ketiga hanya sebesar 1,97 persen sedangkan jika sektor pertambangan dan penggalian tidak memasukkan dalam hitungan sektor ini mampu memberikan share sebesar 6,93 persen setelah sektor jasa-jasa dan pertanian. Melihat kondisi di atas pemerintah kabupaten terus berupaya untuk pengembangan sektor ini sehingga mampu meningkatkan share sektor ini. Pembentukan sektor industri pengolahan ini tersebar dari sub sektor makanan dan minuman hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan industri di kabupaten luwu Timur sebagian besar merupakan industri kecil dan menengah dan industri rumah tangga.

Mengenai masalah pengangguran di Kabupaten Luwu Timur merupakan sesuatu yang tidak mungkin dapat di hapuskan, namun hanya dapat dikurangi antara lain dengan upaya yang kuat untuk dapat memperluas kesempatan kerja dengan cara meningkatkan kegiatan ekonomi yang baru, Peningkatan Kompetensi bagi angkatan kerja. pengembangan industri pertanian di pedesaan, terutama bersifat padat karya yang dapat menyerap relative banyak tenaga kerja dan proses produksi, di samping berupaya menggerakkan sarana dan prasarana di daerah ini melalui berbagai proyek pekerjaan umum, seperti pembuatan jalan, saluran air, bendungan dan jembatan yang juga menyerap banyak tenaga kerja selain di perusahaan atau tempat kerja lainnya.



4.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Guna pencapaian program prioritas Pembangunan sektor Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian maka berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;**
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;**
- c. Program Peningkatan disiplin aparatur;**
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;**
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian KINERJA Dan Keuangan;**
- f. Program perencanaan dan penganggaran SKPD;**
- g. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja;**
- h. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;**
- i. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;**
- j. Program Pengembangan industri kecil dan menengah**
- k. Program peningkatan kemampuan teknologi industri;**
- l. Program penataan Struktur Industri;**
- m. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial;**
- n. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi;**
- o. Program Transmigrasi Lokal;**
- p. Program Pembangunan, dan Pembinaan Masyarakat Transmigrasi.**

Program dan kegiatan-kegiatan tersebut telah disusun dalam rancangan awal RKPD tahun 2018, namun melalui pertimbangan dan analisa kebutuhan berdasarkan hasil musrembang dengan mempertimbangkan anggaran yang dialokasikan pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian maka beberapa kegiatan akhirnya dipadukan dan dioptimalkan dalam kegiatan yang berkaitan.



2.5 Penelahaan Usulan Program Dan Kegiatan

Sinkronisasi program prioritas dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian yang telah ditetapkan melalui **RPJMD** dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui tahapan berikut :

- Kebijakan umum setiap agenda pokok pembangunan dijabarkan oleh tim perancangan daerah (BAPPELITBANGDA) yang kemudian hari oleh dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian di perjelas dalam bentuk Program Prioritas dengan indikator keluaran / sasaran dan pagu indikatif yang jelas.
- Program prioritas dan pagu indikatif dari masing-masing bidang di dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian akan menjadi bahan diskusi dalam Musrembang Kecamatan Untuk menyusun rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan dibahas dalam Musrembang Kabupaten.
- Hasil Musrembang Kabupaten akan menjadi bahan dalam penyusunan RKPD tahun tersebut.

Adapun program dan prioritas dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian kab. Luwu timur tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada form II (terlampir)



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.1.1. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai tujuan untuk jangka menengah tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan kerjasama ketenagakerjaan antar daerah.
- Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan penanganan permasalahan hubungan industrial .
- Mendorong dan memfasilitasi pelayanan terhadap masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya melalui pola transmigrasi umum dan lokal.
- Mewujudkan industri yang handal dan berdaya saing
- Meningkatkan kualitas kinerja dan prinsip Good Governance dilingkungan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Perindustrian.

3.1.2. Sasaran

Sasaran yang dicapai Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan jangka menengah tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- Meningkatnya kapasitas tenaga kerja dan lapangan usaha dalam daerah
- Meningkatkan kerjasama dan harmonisasi antara pihak swasta dan masyarakat serta pihak swasta/perusahaan dengan pekerja.
- Penyiapan permukiman dan penempatan, pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi, pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi
- Meningkatnya jumlah usaha iklim yang berkualitas
- Meningkatnya nilai tambah dan hasil produksi IKM
- Tersedianya mapping struktur industri yang jelas dan akurat.
- Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima berbasis reformasi birokrasi serta meningkatnya kualitas system pelaporan kinerja dan keuangan SKPD



3.2. Program dan Kegiatan

Program kegiatan adalah kumpulan dari beberapa kegiatan yang tersusun secara sistematis dan terpadu yang apabila dilaksanakan dengan baik sesuai dengan urutan/sistematikanya akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 dapat di lihat pada Form II



BAB IV

PENUTUP

Dokumen rencana kerja (Renja) ini disusun dengan tetap memperhatikan arahan dan substansi materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021.

Renja ini memiliki fungsi sebagai instrument pengarah dan pengendali pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang akan dilakukan oleh Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Rencana Kerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 ini diharapkan dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi secara keseluruhan. Diseminasi Renja ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa, bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja dan bagaimana tingkat keberhasilan diukur.

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 ini, semua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode Tahun 2018 diharapkan akan mengacu pada Renja yang telah disepakati bersama.

Akhirnya, bahwa keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat tergantung pada kinerja seluruh aparat lingkup Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 13 Juli 2018



Rir. H. FIRNANDUS ALI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19600515 198503 1 020

